

# Pemaknaan Khalayak Terhadap Identitas Setya Novanto Di Indonesia Lawyer Club Dalam Kasus Korupsi E-KTP

I Nyoman Adhithaya Sawitra, Gatut Priyowidodo, Daniel Budiana  
Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

[nyomanina@gmail.com](mailto:nyomanina@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang pemaknaan khalayak terhadap identitas Setya Novanto di Indonesian Lawyer Club dalam kasus korupsi E-KTP. Teori dasar yang digunakan adalah teori *encoding-decoding* yang ditemukan oleh Stuart Hall tentang bagaimana khalayak memproduksi sebuah pesan dari suatu teks media tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh kapasitas setiap penonton. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan dengan latar belakang berbeda yakni politikus partai Golkar, politisi Gerindra, pengamat politik, dan mantan wartawan politik. Hasil penelitian menunjukkan dimaknai secara berbeda oleh para informan.

Pemaknaan tersebut mempengaruhi posisi informan, dimana semua informan berada pada *opositional position* kecuali pada topik tertentu. Informan 4 berada pada *dominant position* saat memaknai nilai berita dari ILC yakni *proximity*. Informan 1 dan 2 berada pada *Negotiated Position* saat memaknai status tersangka Setya Novanto bahwa Setya Novanto merupakan korban di kasus korupsi e-KTP. Berbeda dengan tayangan yang menggambarkan Setya Novanto dikorbankan KPK, kedua informan ini menilai Setya dikorbankan oleh dalang kasus e-KTP yang sebenarnya. Informan 3 berada pada *negotiated position* saat memaknai nilai berita ILC. Sedangkan terkait identitas Setya Novanto, semua berada pada posisi *opositional position*. Faktor-faktor yang mempengaruhi posisi penonton dilihat dari faktor latar belakang pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan pengetahuan lainnya terkait tayangan dan politik.

**Kata Kunci:** Tayangan Politik, Identitas, Pemaknaan Penonton, Analisis Penerimaan

## Pendahuluan

Indonesia pernah diguncangkan dengan adanya kasus korupsi yang menyita perhatian publik, yaitu kasus korupsi e-KTP. Proyek pemerintah e-KTP sendiri adalah program digitalisasi database kependudukan nasional dan juga pembaharuan sistem keamanan serta pengendalian, baik secara administrasi ataupun teknologi informasi. Muara dari program ini adalah bahwa setiap warga Indonesia memiliki KTP yang dibuat secara

elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan terhubung dengan database terpusat. Seiring berjalannya proyek tersebut ternyata KPK menemukan praktik korupsi yang menyebabkan kerugian negara 2,3 triliun rupiah, atau hampir separuh dari nilai proyek yakni 5, 9 triliun rupiah (Nugroho, 2017, para. 6). Dari beberapa saksi yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, terdapat banyak nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Para legislator Indonesia tersebut diduga menjadi aktor di balik penggelembungan anggaran proyek e-KTP (Sadri, 2017, para. 2).

Kasus korupsi ini menjadi perhatian publik ketika KPK menetapkan sosok Setya Novanto yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua DPR periode tahun 2014-2019 sebagai tersangka. Proses penetapan tersangka tersebut tentu diberitakan oleh banyak awak media, yang notabene narasi sebuah informasi terdapat ideologi masing-masing media yang disusun secara tersistematis sehingga terbentuk wacana bermakna (Hamad, 2004, p.10).

Berangkat dari pengertian tersebut peneliti melihat TV One memiliki kepentingan tersendiri terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP. Hal tersebut dapat dicontohkan pada saat Abu Rizal Bakrie masih menjadi ketua umum Golkar dan hendak mencalonkan presiden tahun 2014, terjadi kanalisasi arah berita TV One yang cenderung mempromosikan tokoh Abu Rizal Bakrie dan kampanye Golkar pada umumnya (Heychael dan Dhona, 2014, p. 5). Pada konteks penelitian ini, kecurigaan peneliti terhadap TV One melalui program ILC sebagai ruang pembelaan terhadap Setnov terlihat dari penonjolan beberapa bagian yang seperti mengarahkan khalayak pada pemahaman tertentu. Contohnya adalah episode ILC pada tanggal 3 Oktober yang bertema “*Novanto Wow!*”, yang membahas putusan penganuliran status tersangka Setnov pada tingkat praperadilan sebagai sesuatu yang wajar, khususnya dapat dilihat dari narasi pengantar episode tersebut.

Meskipun demikian khalayak selalu memiliki potensi untuk menerima dan memaknai secara berbeda dari makna yang dikonstruksi media massa. Penerimaan dan pemaknaan khalayak mengenai Setya Novanto pun dapat berbeda, bahkan berkebalikan, dengan makna yang dikonstruksi tayangan ILC. Pemaknaan khalayak atas sebuah informasi media massa merupakan suatu hal bersifat polisemi, yakni dapat berbeda bahkan bersebrangan dengan konstruksi makna yang disediakan oleh institusi media massa (Fiske, 1987, p. 80). David Morley (dalam Ida 2014, p. 47) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pemaknaan khalayak, yang sifatnya individual, muncul dikarenakan setiap orang mempunyai potensi pengalaman belajar dan lingkungan serta tujuan dalam mengonsumsi pesan-pesan media massa.

Kasus korupsi e-KTP sendiri juga memenuhi kriteria nilai berita sebagai berita yang layak untuk masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan tercakupnya nilai berita yaitu *significance*, *magnitude*, dan *prominence*. Nilai *significance* dari korupsi e-KTP dapat dilihat dari terganggunya program digitalisasi data kependudukan di Indonesia akibat kasus tersebut . sehingga tentunya berdampak bagi masyarakat luas atau khalayak.

Kedua, adalah nilai *magnitude*, yakni peristiwa yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau peristiwa yang akibatnya bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat khalayak. Pada konteks ini, nilai tersebut dapat dilihat dari besarnya dugaan kerugian negara akibat korupsi e-KTP. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa kerugian negara dalam proyek tersebut setidaknya 2,3 triliun rupiah, atau hampir separuh dari nilai proyek yakni 5, 9 triliun rupiah (Nugroho, 2017, para. 6). Terakhir adalah nilai *prominence*, yang berarti bahwa kasus korupsi e-KTP dianggap menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh khalayak, seperti orang, benda, atau tempat (Siregar, 1998, p.27).

Selain fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti juga melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu bertema serupa. Peneliti setidaknya menemukan tiga penelitian. Pertama, adalah penelitian Semeru Gesta pada tahun 2010 yang membahas kebijakan internal TV One dalam mempublikasikan tayangannya ke media online yang dimilikinya. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menemukan bahwa kebijakan mempublikasikan tayangan secara online dalam rangka konvergensi media oleh TV One sebagai institusi media massa, serta untuk memudahkan penonton menikmati tayangan TV One. Penelitian kedua, merupakan penelitian yang dilakukan Firdha Junita dan Mulharnetti Syas pada tahun 2017. Kajian yang kemudian diterbitkan dalam jurnal “Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi Vol.1 No.01 tahun 2017”, merupakan penelitian framing berita pada dua surat kabar *Kompas* dan *Tempo* edisi bulan Maret 2017. Penelitian tersebut menemukan bahwa frame kedua surat kabar yang ditelitinya, dalam kasus korupsi e-KTP, memojokkan para pelaku korupsi. Terakhir, penelitian Fatimah Choirinnisa yang juga meneliti tentang framing koran *Kompas* pada kasus korupsi e-KTP. Penelitian yang dilakukan tahun 2017 tersebut menemukan bahwa berita-berita kompas pada kasus korupsi e-KTP tampak menonjolkan bahwa anggota DPR merupakan aktor utama dalam kasus tersebut, sebuah hal tampak pada berita-berita Setya Novanto. Dengan melihat penelitian terdahulu tersebut, peneliti melihat bahwa pemberitaan kasus korupsi e-KTP, salah satu materinya ialah subkasus penangkapan Setya Novanto, merupakan hal yang penting untuk diteliti, khususnya pada tingkat penerimaan khalayak.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, peneliti akhirnya memutuskan untuk meneliti pemaknaan khalayak pada tayangan TV One dalam kasus korupsi e-KTP, dengan fokus objek penelitian adalah pemaknaan terhadap sosok Setya Novanto dalam tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) periode September-Desember. Rentang waktu itu dipilih karena pada periode tersebut ILC cukup sering membahas kasus korupsi e-KTP, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pemaknaan khalayak terhadap sosok Setya Novanto tentu berkaitan dengan statusnya sebagai anggota DPR yang terlibat kasus korupsi e-KTP. Subjek penelitian ini antara lain: (1) Pengamat politik dari dosen ilmu politik, (2) Praktisi politik atau politisi dari partai Gerindra (3) Mantan wartawan politik dan seorang aktivis perempuan (4) Politisi dari partai Golkar.

Bagaimana pemaknaan khalayak terhadap Setya Novanto dalam tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) periode September-Desember 2017 pada kasus korupsi e-KTP?

## Tinjauan Pustaka

### Khalayak

Khalayak merupakan sebutan bagi masyarakat yang diterpa atau yang menanggapi kebudayaan dan produk media, misal berita-berita dari media massa (Stokes, 2007, p. 146). Meskipun terlihat satu arah, khalayak selalu memiliki otonomi dalam melakukan pemaknaan terhadap produk dan kebudayaan media massa. Pemaknaan khalayak atas sebuah informasi media massa merupakan suatu hal bersifat polisemi, yakni dapat berbeda bahkan bersebrangan dengan konstruksi makna yang disediakan oleh institusi media massa (Fiske, 1987, p. 32). Pengonsumsian produk media massa bukan merupakan proses yang kosong, misalnya pada membaca berita. Pada saat membaca berita, proses pemaknaan oleh khalayak di satu titik dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda dari makna yang dibangun media massa. Adanya perbedaan pemaknaan khalayak yang sifatnya individual muncul dikarenakan setiap orang mempunyai potensi pengalaman belajar dan lingkungan serta tujuan dalam mengonsumsi pesan-pesan yang berbeda-beda (Ida 2014, p. 47).

Dengan demikian, dapat diartikan juga bahwa makna teks bukan hanya melekat pada media, tetapi juga berada pada pemahaman khalayak yang menyaksikannya (Jensen, 2002, p. 139). Keaktifan dalam pemaknaan khalayak menerima tayangan media massa inilah yang menjadi dasar bagi metode *reception analysis* atau analisis penerimaan (khalayak).

### *Reception Analysis*

*Reception analysis* adalah pembacaan terhadap bagaimana khalayak menerima dan memaknai pesan yang disampaikan oleh media massa, dimana didalamnya terdapat proses negosiasi makna yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pandangan dari tiap individu (McQuail, 1997, p. 76). Selanjutnya, salah satu paradigma yang dapat digunakan dalam penelitian *reception analysis* adalah Paradigma Encoding/Encoding. Paradigma berpegang pada teori Encoding/Decoding milik Stuart Hall. Teori encoding/decoding merupakan teori menjelaskan bahwa proses penyampaian pesan kepada khalayak bukan merupakan proses satu arah. Perbedaan respon yang timbul merupakan bukti bahwa khalayak mengolah pesan yang disampaikan oleh media dengan mempertimbangkan pelbagai faktor (Alsuutari, 1999, p. 140).

Stuart Hall (dalam Alasuutari, 1999) menyebutkan bahwa terdapat tiga tipe pembacaan atau pemaknaan khalayak dalam komunikasi massa yaitu pertama *The dominant/hegemonic code* adalah tingkat konotatif pesan diterjemahkan dalam hal dominan makna yang lebih disukai. Artinya, pada tipe dominan ini pemaknaan khalayak secara umum sejalan atau bersepakat dengan kode-kodedan makna yang diberikan media, kedua *The negotiated code* merupakan mengandung campuran

unsur adaptif dan oposisi. Pada tipe ini mengakui adanya kode dominan, tapi mengadaptasi pembacaan sesuai kondisi sosial dari khalayak dan terakhir *The oppositional code* adalah posisi ketika secara umum khalayak tidak setuju dengan kode dan makna yang diberikan teks media yang diterimanya.

Teori *Encoding/Decoding* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data, yang berupa informasi dari penerimaan para informan mengenai objek penelitian, yang hasilnya ialah pemetaan tipe penerimaan khalayak.

## Metode

### Konseptualisasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya, sehingga yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman atau kualitas data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006, p. 69). Sementara itu, jenis penelitian deskriptif dipilih karena peneliti ingin melihat bagaimana data-data yang telah didapatkan selanjutnya dideskripsikan dan bisa menghasilkan pemahaman secara kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan data-data yang didapatkan dari wawancara mendalam terhadap informan terkait pemaknaan terhadap Setya Novanto dalam tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) periode September-Desember 2017. Selanjutnya, temuan data tersebut akan dideskripsikan sehingga menghasilkan pemahaman mengenai masalah yang diajukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perimaaan atau *reception analysis*. Metode *Reception Analysis* dipilih karena dapat menjadi panduan guna mengetahui proses pembuatan makna yang dilakukan oleh khalayak ketika mengonsumsi produk media (Ida, 2014, p. 161). Selain itu pembacaan terhadap bagaimana khalayak menerima dan memaknai pesan yang disampaikan oleh media terdapat proses negosiasi makna yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pandangan dari tiap individu (McQuail, 1997, p. 74). Dengan demikian, proses produksi makna diharapkan tidak bersifat satu arah. Maksudnya, bahwa makna dari media massa dapat diterima atau dianut oleh khalayak dengan begitu saja karena khalayak bukanlah subjek pasif. Melalui pengalaman yang berbeda-beda menyebabkan pemaknaan khalayak terhadap suatu berita dapat berbeda pula. Perbedaan pengalaman inilah yang dapat menyebabkan beragamnya variasi makna terhadap suatu hal, dalam konteks penelitian ini, yakni identitas Setya Novanto.

### *Subjek Penelitian*

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang menonton tayangan kasus e-KTP pada Indonesia Lawyer Club (ILC) pada periode September-Desember 2017, yakni perkembangan kasus Setya Novanto. Individu-individu tersebut yang nantinya menjadi khalayak atau informan penelitian. Subjek penelitian atau informan dipilih melalui *purpose sampling* terdiri dari empat orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga akan terdapat keragaman pemaknaan (Ida, 2014, p. 47), dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, informan yang termasuk *pengamat politik*. Peneliti memilih pengamat politik untuk mendapatkan informasi pengalaman serta pengetahuan informan tentang kasus korupsi e-KTP dan korelasinya politik Indonesia secara umum. Kedua, Informan termasuk *praktisi politik atau politisi partai PAN*. Informan dengan kriteria ini dipilih guna memperoleh data tentang pemaknaan politisi terhadap tayangan kasus Korupsi e-KTP, sebuah kasus yang menyeret banyak politisi sebagai tersangka. Ketiga, Informan *mantan wartawan*. Melalui wawancara, informan kriteria ini peneliti ingin memperoleh data tentang pemaknaan terhadap kasus korupsi e-KTP yang merupakan sebuah peristiwa atau kasus yang diberitakan oleh media, dan tentunya berita tersebut dibuat oleh seorang jurnalis maupun wartawan. Keempat, Informan yang termasuk *politisi partai dari partai Golkar*, dikarenakan peneliti ingin mendapat informasi atau data dari perspektif praktisi politik dari kubu Golkar yang memiliki keterkaitan dalam kasus korupsi e-KTP dan terakhir informan dalam penelitian ini minimal telah menonton satu tayangan ILC yang membahas kasus korupsi e-KTP pada periode September-Desember 2017.

### *Analisis Data*

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara mandalam yang berupa rekaman audio lalu ditranskrip dengan cara menulis ulang secara keseluruhan. Melalui uraian tersebut penelitian akan melihat bagaimana khalayak melakukan pemaknaan terhadap sosok Setya Novanto dalam pada tayangan *Indonesia Lawyer Club (ILC)* periode September-desember 2017 pada kasus korupsi e-KTP. Selain itu, penelitian ini juga akan mengalisis lebih lanjut uraian tersebut dengan latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan dari masing-masing informan. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan peneliti antara lain. *Pertama*, berbekal tabel atau matrik pemaknaan yang telah diklasifikasikan, peneliti akan melihat apakah decoding atau penerimaan informan terhadap sosok Setya Novanto dalam tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) pada kasus korupsi e-KTP sama dengan yang didecoding/dikonstruksikan oleh media tersebut. Pada proses ini peneliti juga akan melihat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan para informan. *Kedua*, melakukan pemetaan posisi para informan sesuai tiga tipe khalayak dalam teori Encoding/Decoding, yakni *the dominan/hegemonic code, the negotiated code, the oppositional code*. Pemetaan tipe-tipe khalayak inilah yang akan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## Temuan Data

### Nilai Berita Kasus Korupsi e-KTP dengan Tersangka Setya Novanto

Nilai berita yang ditekankan oleh Indonesia Lawyer Club *prominance* yakni sebagai kebesaran tokoh. Setya Novanto mempunyai unsur kebesaran tokoh sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar. Pemimpin partai atau pemimpin lembaga negara selalu menjadi sorotan ketika terlibat dalam masalah korupsi karena dianggap sebagai representasi institusi yang dia pimpin. Berdasarkan hasil wawancara keempat informan, dapat dilihat bahwa ada satu khalayak yang memaknai nilai berita secara *the dominant code* atau sama dengan yang disampaikan oleh Indonesia Lawyer Club bahwa hanya nilai berita *prominance* saja yang ada di dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang melibatkan nama Setya Novanto sehingga layak diperbincangkan dalam *talkshow*. Informan 4 itu tak hanya mempunyai *dominant code* tetapi juga menganggap berita yang disampaikan oleh Indonesia Lawyer Club sudah cukup obyektif. Pernyataan tersebut ditegaskan dari hasil wawancara berikut ini:

*“Menurut saya kebebasan untuk berapresiasi, saya kira sah sah aja, menurut saya tidak ada masalah, opini publik yang dibangun melalui Indonesia lawyer club selalu obyektif dan sumber yang jelas.”*

Sementara khalayak lainnya lebih cenderung *oppositional code* atau berlawanan dengan tayangan tersebut yakni alasan hal itu diangkat karena *proximity, magnitude, dan timeliness*. *Oppositional code* juga terlihat karena tayangan ILC yang melibatkan nama Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini dianggap sebagai ekonomi politik media. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 1 dalam wawancara berikut ini:

*“Soal E-KTP ini dari TVOne dari segmen ILC, sebenarnya ILC itu lebih mengarah PRO ke Setnov, saksi-saksi yang dihadirkan pasti punya agenda, dan Setnov kader Golkar, sedangkan Bakhrie itu kan juga orang Golkar, pasti ada keterpihakan TVOne sebagai salah satu TV Berita Nasional bisa mengcounterlah posisi Setnov. Kesannya menggiring masyarakat tidak buruk-buruk banget loh, dan memberikan perspektif lain.”*

### Setya Novanto Tak Layak Menjadi DPR Ketika Terkena Kasus Korupsi

Melihat tugas pimpinan DPR menunjukkan bahwa Ketua DPR adalah alat kelengkapan dan menjadi representasi DPR di mata publik. Keterlibatan Setya Novanto di kasus korupsi proyek e-KTP dianggap mencoreng citra DPR. Lembaga membutuhkan citra baik untuk mendapatkan dukungan publik. Maka dari itu, jawaban keempat informan tentang Setya Novanto bahwa keterlibatannya dalam kasus korupsi membuatnya tak layak menjadi Ketua DPR dibawa saat memaknai

tontonan di *Indonesia Lawyer Club*. Hasil akhirnya, para informan memaknai secara *the oppositional code* terhadap identitas Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kutipan yaitu:

*"...namanya DPR itu selalu mendapat peran Antagonis, karena tidak ada itu tidak ada side a side, tidak ada yang di perbandingkan. Pada kepentingan masyarakat, ada loh ketua dewan, sekelas ketua DPR, teridentifikasi bahkan jelas memakan uang proyek korupsi E-KTP. Jadi buat apa ILC bela pakai suara Fachri Hamzah? Dibela atau tidak tetap buruk."* Informan 1

*"Dia itu bukan figure yang ideal bagi ketua DPR, dengan kapasitas dia pada sektor pengelolaan, sektor legislasi, pengelolaan lembaga, manajerialnya kurang."* Informan 2

*"Saya bilang ya, tanpa kecuali ya, apalagi anggota DPR, harusnya sadar, bahwa anggota DPR Pejabat kan harus bebas dari persoalan-persoalan masalah hukum. Sumpah jabatan kan sudah jelas, tidak boleh melakukan rasional yang diluar kewenangan, apalagi kalau sudah menjadi makelar, kan tidak boleh sudah.. ILC terlalu banyak memberi porsi bagi narasumber Setnov mestinya pengacara yang dihadirkan Cuma satu bukan dua atau lebih"* Informan 4

### **Citra Setya Novanto mempengaruhi Citra Partai Golkar**

Citra Setya Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar. Informan 4 menganggap tayangan ILC yang menunjukkan adanya kader Golkar terhadap Setya Novanto itu wajar, namun di sisi lain, tingkah laku Setya Novanto yang berkaitan dengan kasus korupsi inilah yang menyebabkan citra Golkar dihadapan publik menjadi memburuk. Penjelasan Informan 4 ini terlihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*"Saya kira tidak ada pembelaan, sekarang apa yang mau dibela? ILC itu hanya mempublish peristiwa yang terjadi pada Setya Novanto. ya meski harusnya kita sebagai kader ga perlu muncul di ILC. Sudah ada pengacara kok., kalau menurut aku sah sah aja, karena di Indonesia kan ada undang-undang kebebasan informasi publik, siapapun boleh sekarang. Kecuali urusan Pertahan, Keamanan, Mahkamah yang gak boleh. Rusaknya Golkar itu setelah Setya Novanto, mulai dari pimpinan sampai ARB justru kekayaannya berkurang, karena mimpin partai."*

*"Ya ada pengaruh elektabilitas partai Golkar, ya kalau satu orang kader berbuat jahat pasti berpengaruh, kalau dibilang tidak ada pengaruh ya omong kosonglah, rakyat kan bisa menilai secara obyektif. Ya seperti kasusnya Yahya Zaini dengan Maria Eva, pernah dengerkan? Ya itu kan juga mencoreng nama Golkar juga."*

### **Analisis dan Interpretasi**

Hasil pemaknaan khalayak terhadap tayangan *Indonesia Lawyer Club* periode September-Desember 2017 mengenai kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto sebagai tersangka terlihat seperti di bawah ini:

Keempat informan yang merupakan khalayak ILC ini ternyata memiliki perbedaan pemaknaan khalayak yang sifatnya individual, hal ini muncul dikarenakan setiap orang mempunyai potensi pengalaman belajar dan lingkungan serta tujuan dalam mengonsumsi pesan-pesan yang berbeda-beda (Ida 2014, p. 47). Dengan demikian, dapat diartikan juga bahwa makna teks bukan hanya melekat pada media, tetapi juga berada pada pemahaman khalayak yang menyaksikannya (Jasen, 2002, p.139). Pemaknaan khalayak yang jarang ada yang *dominant code* dikarenakan mereka berasal dari kelompok yang mempunyai pendidikan politik. Mereka tidak terpaku pada satu informasi tetapi juga banyak mengonsumsi dari berbagai media. *The opposite code* terlihat di penggambaran identitas Setya Novanto dalam ILC. Para informan melihat adanya bias dalam pesan yang disajikan ILC dan berusaha tidak menerimanya begitu saja. khalayak paham bahwa identitas sebagai Ketua DPR tidak membuatnya terbebas dari jeratan hukum.

Terkait nilai berita, informan 1 dan 2 memaknai berbeda, informan 3 terjadi negosiasi makna, sedangkan informan 4 mengalami *the dominant code*. Di lihat latar belakang para informan, informan 3 mempunyai negosiasi makna karena dia juga mantan wartawan politik yang pernah meliput Setya Novanto sehingga ada nilai berita yang sama karena juga mempunyai identitas yang sama dengan ILC yakni latar belakang media massa. Latar belakang Informan 3 sebagai mantan wartawan politik yang pernah meliput Setya Novanto juga mempengaruhinya dalam memandang status tersangka Setya Novanto.

*“Saat saya masih menjadi wartawan di media nasional, saya ambil bagian dalam peliputan edisi khusus Setyo Novanto yang berjudul Bandar Proyek Partai Beringin tahun 2013. Waktu itu saya wawancara langsung dengan Setya Novanto, salah satunya mengenai E-KTP. Mengkonfirmasi tentang sejumlah pengusaha yang mengatakan Setnov merupakan pihak yang mengatur pemenang tender e-KTP. Waktu itu Mendagri masih Gamwan Fauzi. Sebenarnya ini proyek lama, sekitar 2012 kalau ga salah.”*

Sedangkan Informan 4 mengalami *the dominant code* pada nilai berita yang artinya sepakat dengan nilai berita yang diambil oleh TV One dalam *Indonesia Lawyer Club*. Kepercayaan ini karena Informan 3 sebagai kader Partai Golkar simpati dengan Aburizal Bakrie yang juga pemilik Grup Media Viva.

*“Rusaknya Golkar itu setelah Setya Novanto, mulai dari pimpinan sampai ARB justru kekayaannya berkurang, karena mimpin partai.”*

Sementara Informan 2 memaknai tayangan ILC yang membahas status tersangka Setya Novanto dengan *negotiated code*. Setnov dianggap korban dari partainya untuk mencari dana pembiayaan partai. Pemaknaan ini dikarenakan Informan 2 yang mempunyai latar belakang partai politik sehingga mengetahui pengelolaan organisasi tersebut.

*“Alhamdulillah untuk sementara ini saya gak punya, semoga jangan, kalau punya pengalaman saya pasti jadi saksi di KPK. Jujur aja dulu sampai sekarang memang*

*beberapa kali melihat muncul praktek-praktek kayak gitu, karena korupsi itu cara paling gampang mendapatkan keuntungan, ya cukup lumayan pengalamannya dan Alhamdulillah sampai sekarang beberapa kali mengetahui itu.*

Sedangkan Informan 1 juga terdapat *the negotiated code* saat memaknai status tersangka Setya Novanto sebagai korban sama dengan tayangan ILC—namun dikarenakan ada pihak lain yang tak ingin terkenan kasus hukum. Posisi informan 1 sebagai pengamat politik menyebabkan dia berpikir dari banyak sudut dengan mempertimbangkan pro dan kontra terhadap kasus yang melibatkan Setya Novanto

*“Karena backgroundku orang komunikasi, dan aku tahu berita itu di produksi, jujur ya aku tidak begitu suka tontonan televise, karena aku tahu pasti ada agenda di balik itu, jadi kalau aku membaca entah itu berita online, atau majalah, hanya untuk melihat apa yang lagi hit sekarang. Karena aku tahu, aku bukan masyarakat awam. Kalau masyarakat awam akan terarahkan, ketika media itu mem-presaure berita A, orang-orang cenderung ke arah A, aku gak ke arah seperti itu, jadi aku membatasi diriku konsumsi berita sedemikian rupa. Karena jika aku mengkonsumsi itu, mau tidak mau aku akan terteka, begitu aku terteka, aku pasti tidak bisa objektif menilai peristiwa. Orang-orang di ILC aku akuin bahwa argumen-argumen itu cukup seru untuk di Logikakan, jadinya tuh: “oh iya ya... oh iya ya...” itu benar-benar menggiring, tidak hanya debat kusir yang hanya di talkshow-talkshow.”*

Dengan demikian, empat informan ini tak bisa disebut sebagai khalayak yang pasif karena pola memaknai pesan media dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman masing-masing dan pola konsumsi media massa. Keempat informan ini tak hanya mendapatkan informasi dari ILC tetapi juga media massa lainnya. Seperti yang tercantum dalam kutipan-kutipan hasil wawancara berikut ini.

*“Aku biasanya media online atau majalah. Karena dia punya in-depth interview yang baik” Informan 1*

*“Aku sih Cuma berita-berita online, yang kayak Twitter, twit-twit dari orang-orang yang membikin negatif-positif, kubu-kubunya, beberapa berita Hoax yang muncul, bahkan juga di portal berita online koran” Informan 2*

*“....saya lebih suka mengikuti dari media cetak. Lebih dalam.” Informan 3*

*“Kalau saya sempat nonton TV kalau gak sempat ya HP kan bisa tayangan tertunda.,” Informan 4*

Keaktifan khalayak dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna yang diproduksi oleh media massa menjadi dasar bagi metode reception analysis atau analisis penerimaan (khalayak). Selain karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan, keaktifan khalayakan mempersepsi pesan juga dikarena pola konsumsi media.

Keempat informan ini ternyata suka membaca berita atau konsumsi media. Misalnya seperti Informan 1 seperti yang dikutip di bawah ini:

“Aku biasanya media online atau majalah karena lebih dalam, ada in-depth interview.”

“Sebenarnya tidak ada media yang tidak memihak, satu orang punya beberapa media, dan media itu berkecimpung pada sektor pemerintahan atau sektor-sektor politik. Jadi narasumbernya pun menyesuaikan dengan apa yang di tau apa kepentingan media itu sendiri.”

Mencermati jawaban keempat informan ini menunjukkan khalayak tidak lagi pasif sebagai konsumen. Saat ini, khalayak tidak hanya sebatas menerima informasi melainkan juga menyampaikan opini, pandangan atau pemikirannya dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun melalui media.

## Simpulan

Pemaknaan *the hegemonic/dominant code* hanya diungkapkan oleh Informan 4 yang merupakan Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur saat mengomentari nilai berita dan menganggap apa yang disampaikan dalam tayangan ILC adalah cukup obyektif karena ILC dan Informan 4 sama-sama berafiliasi dengan Partai Golkar. Pendapat *the negotiated code* Informan 3 ini disebabkan karena dia mempunyai latar belakang sebagai wartawan politik. Namun dia mengkritik ILC yang terlalu fokus pada satu nilai berita padahal masih ada nilai berita lain yang layak diangkat. Sedangkan *the negotiated code* terlihat saat dua informan yakni Informan 1 dan Informan 2 memaknai tentang status tersangka Setya Novanto. Jika ILC menggambarkan Setya Novanto sebagai korban kriminalisasi KPK, dua informan menilai Setya Novanto memang korban tetapi dia dikorbankan oleh orang yang posisinya lebih tinggi agar tidak tertangkap KPK. Informan 1 adalah pengamat politik dengan latar belakang pendidikan di bidang komunikasi politik sehingga dia tidak mudah percaya dengan yang disampaikan oleh ILC terkait nilai berita dan penggambaran identitas Setnov. Sedangkan Informan 2 menjawab seperti itu karena dia adalah sesama politisi partai yang juga berkecimpung pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meski hanya sebagai asisten legislator. Pengalamannya itulah yang mempengaruhi pemaknaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penonton televisi adalah khalayak aktif saat mengkonsumsi media, seperti yang terlihat dari hasil pemaknaan keempat informan penelitian. Namun keaktifan mereka sebagai khalayak dipengaruhi oleh latar belakang seperti tingkat pendidikan, perilaku mengkonsumsi media, dan jenis pekerjaan. Artinya, pemaknaan yang dibuat khalayak saat menonton televisi dipengaruhi oleh pengalaman dan referensinya.

## Daftar Referensi

Alasuutari, P. (1999). *Rethinking the Media Audience*. London: SAGE Publication.



- Fiske, J. (2004). *Cultural and Communication Studies*. Yogyakarta: Jalasutra
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Heychael, M. & Dhona, H. R. (2014). *Independensi Televisi Menjelang 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*. Jakarta: Remotivi.
- Ida, Rachmah. (2014). *Metode Penelitian : Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Kencana
- Jensen, K. B. (2002). *A Handbook of Media and Communication Research, Qualitative and Quantitative Methodologies*. London: Routledge
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- McQuail, D. (1997), *Audience Analysis*. London: SAGE Publications.
- Choirinnisa, F. (2017). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek E-KTP di Surat Kabar Harian Kompas*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Gesta, S. (2010). *Analisis Kebijakan Redaksi Tv One Dalam Memublikasikan Berita dari Tv ke Online*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Junita, F & Syas, M. (2017,May). Perbandingan Frame Berita tentang Kasus Korupsi Proyek Pengadaan KTP Elektronik Antara Surat kabar Kompas dan Koran Tempo. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi, 1(1)*, 176-182.
- Nugroho, B P. (2017, March 4). *Kasus e-KTP: Rp 2,3 T Kerugian Negara, 2 Tersangka dan 280 Saksi*. Retrieved January 14, 2018, from <https://news.detik.com/berita/d-3442042/kasus-e-ktp-rp-23-t-kerugian-negara-2-tersangka-dan-280-saksi>
- Nurita, D. (2017, December 13). *Begini Kronologi Kasus Setya Novanto*. Retrieved January 15, 2018, from <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto>.
- Sadri, M. (2017, March 9). *Korupsi e-KTP Berjamaah, Ini Daftar Lengkap Nama yang Disebut Terima Aliran Dana*. Retrieved January 14, 2018, from <https://www.jawapos.com/read/2017/03/09/115040/korupsi-e-ktp-berjamaah-ini-daftar-lengkap-nama-yang-disebut-terima-aliran-dana>.

